

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Sinurat (2018) dalam bukunya mengemukakan bahwa kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pada dasarnya, pengelolaan keuangan daerah sangat penting dalam mengukur kapasitas penyelenggaraan otonomi daerah dan kapabilitas organisasi pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan berdasarkan prinsip dan asas pengelolaan keuangan daerah yang harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat (Sinurat, 2018).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pernyataan No.1 Penyajian Laporan Keuangan tentang Tujuan Laporan Keuangan pada paragraf 9 menyatakan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi - transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
2. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
3. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
6. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
7. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya (PSAP Berbasis Akrua1 No.1:9).

Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Wati dkk, 2014). Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Di mana pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik (Nurillah, 2014). Oleh karena itu, Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan (Husna, 2013).

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang sangat benar dan jujur yang dapat membantu pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi (Mahayani

dkk, 2017). Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode - periode sebelumnya. Namun demikian, perlu disadari bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, laporan keuangan menggambarkan pengaruh dari kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan (Haza, 2015).

Menurut Nurillah (2014) untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkompetensi, maka kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting. Begitu juga di entitas pemerintahan, untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkompetensi dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Menurut Ihsanti (2014) Kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi - fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. SDM merupakan faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini adanya kompetensi SDM mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan (Wati dkk, 2014).

Selain itu, hal yang mendasar dan penting dari penerapan akuntansi didalam penyusunan laporan keuangan salah satunya yaitu sistem akuntansi (Roviyantie, 2012). Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pemerintah telah berupaya untuk menyusun laporan berdasarkan sistem akuntansi keuangan daerah, sehingga kualitas yang dihasilkan dari laporan keuangan daerah tersebut dapat meningkat. Namun kenyataannya tidak semua pegawai dipemerintahan memahami sistem akuntansi keuangan daerah tersebut. Kenyataan didalam laporan keuangan pemerintah daerah masih banyak disajikan data - data yang tidak sesuai dan tidak mengikuti prinsip akuntansi berlaku umum. Banyak laporan keuangan yang mendapatkan opini tidak wajar dan *disclaimer* karena dalam penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan belum memenuhi kelengkapan yang telah ditentukan serta kurangnya bukti-bukti transaksi yang dapat ditemukan (Wati dkk, 2014).

Setiap tahunnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan dilakukan pengecekan atau pemeriksaan yang dalam hal ini, kewenangan pemeriksaan laporan keuangan daerah maupun pusat diberikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang kemudian BPK akan mengeluarkan sebuah opini atas laporan keuangan yang telah diperiksa. BPK dapat memberikan lima macam jenis opini, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Tidak Wajar (TP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (Hasanah dkk, 2019). Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi, 2013).

Hal lainnya yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah teknologi informasi. Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas - tugasnya. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan

Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Manfaat dari teknologi informasi yaitu seperti teknologi komputer, teknologi informasi dipergunakan untuk penyebaran data serta digunakan untuk pemrosesan data dan penyimpanan suatu informasi (Sari dkk, 2016). Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern dirancang dengan baik agar memberikan arahan dan pengawasan sumber daya organisasi untuk pencapaian tujuan secara efektif serta memiliki peran untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan (Siwambudi dkk, 2017). Melihat pentingnya peran SPIP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pimpinan instansi/organisasi harus dapat menjadikan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama tidak hanya pada unit kerja terkecil tapi hingga kepada masing-masing individu.

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan pengaruh laporan keuangan daerah diantaranya dilakukan oleh Nurillah (2014) yang menyatakan bahwa kompetensi SDM, penerapan SAK, pemanfaatan

teknologi informasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Roviyantie (2012) yang membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah. Wati dkk (2014) membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini yang merupakan penelitian replikasi dengan pengembangan model regresi dari regresi sederhana menjadi regresi berganda yaitu menambahkan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi.

Topik penelitian ini penting dikaji pada PPKD dan OPD di Kabupaten Lembata. Hal ini karena kualitas laporan keuangan dimasing - masing PPKD dan OPD dipengaruhi oleh faktor-faktor diantaranya kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi serta sistem pengendalian intern sebagai moderasi. Selain itu belum ada yang meneliti kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian intern pada PPKD dan OPD di Kabupaten Lembata.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dilakukan pada salah satu kabupaten di provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut, sehingga penelitian ini diberi judul: **“KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM AKUNTANSI, DAN TEKNOLOGI INFORMASI PENGARUHNYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI**

VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada PPKD dan OPD di Kabupaten Lembata)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah ada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- 1.2.2 Apakah ada pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- 1.2.3 Apakah ada pengaruh Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- 1.2.4 Apakah Sistem Pengendalian Intern mampu memoderasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- 1.2.5 Apakah Sistem Pengendalian Intern mampu memoderasi pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- 1.2.6 Apakah Sistem Pengendalian Intern mampu memoderasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
- 1.2.7 Apakah ada pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1.2.1 Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- 1.2.2 Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah

- 1.2.3 Untuk mengetahui pengaruh Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- 1.2.4 Untuk mengetahui moderasi Sistem Pengendalian Intern pada pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- 1.2.5 Untuk mengetahui moderasi Sistem Pengendalian Intern pada pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- 1.2.6 Untuk mengetahui moderasi Sistem Pengendalian Intern pada pengaruh Teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah
- 1.2.7 Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah

1.2 Manfaat Penelitian

1.2.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan mengembangkan wawasan, informasi serta pemikiran dan ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem akuntansi keuangan daerah, dan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian sejenis yang tertarik melakukan penelitian selanjutnya.

1.2.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha peningkatan kualitas laporan keuangan yang baik guna mewujudkan sistem pemerintahan yang baik pada pemerintah daerah kabupaten Lembata.